

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dari peneliti di dalam melakukan penelitiannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Selain itu, temuan penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada kesamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian yang ada serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul /Peneliti | Variabel | Metode Penelitian | Hasil |
|----|--|---|-------------------|---|
| 1 | Putu Tuwentina dan Dewa Gede Wirama (2014) Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan <i>Good Corporate Governance</i> pada Kualitas Laba | X : -Konservatisme Akuntansi (KNSV) - GCG (Ukuran Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Y : Kualitas Laba (ERC) | Kuantitatif | Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda didapatkan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba. |
| 2 | Dhian Eka Irawati (2012) Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Laba, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba. | X :- Struktur Modal -Pertumbuhan Laba -Ukuran Perusahaan -Likuiditas Y :-Kualitas Laba | Kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa struktur modal, pertumbuhan laba, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba |

Dilanjutkan

Lanjutan

| | | | | |
|---|--|--|-------------|--|
| | | | | Secara parsial struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Pertumbuhan laba dan likuiditas berpengaruh negative terhadap kualitas laba. |
| 5 | Gahani Purnama Wati (2017) Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan GCG pada Kualitas Laba | X :- Ukuran Perusahaan (<i>Ln total asset</i>) - <i>Leverage (debt to total asset ratio)</i> - GCG Y :- Kualitas Laba (<i>Quality of Income ratio</i>) | Kuantitatif | GCG berpengaruh positive pada kualitas laba, sedangkan ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh pada kualitas laba. |
| 6 | Silviya Yenni Marsela dan Maryono (2017) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba | X:- <i>Good Corporate Governance (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee)</i> - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i> -Ukuran Perusahaan Y : - Kualitas Laba | Kuantitatif | GCG (kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit) berpengaruh positif terhadap kualitas laba. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada kualitas laba. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh pada kualitas laba. Ukuran perusahaan memiliki efek positif pada kualitas laba. |
| 7 | Erikson Simamora dkk (2014) Pengaruh <i>investment opportunity set (IOS)</i> , mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan reputasi KAP terhadap kualitas laba perusahaan. | X :- <i>IOS (MVE/BE)</i> -GCG (Komite audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial) -Reputasi KAP Y :- Kualitas laba (<i>Total Accrual</i>) | Kuantitatif | <i>IOS</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba perusahaan. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Kepemilikan manajerial tidak |

Dilanjutkan

Lanjutan

| | | | | |
|----|--|--|-------------|--|
| | | | | memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. |
| 8 | Kadek Prawisanti Dira dan Ida Bagus Putra Astika (2014) Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Pertumbuhan Laba dan Ukuran Perusahaan pada Kualitas Laba | X :- <i>Struktur Modal</i> -Likuiditas - Pertumbuhan Laba - Ukuran Perusahaan Y :- Kualitas Laba | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pada tingkat keyakinan 95%, struktur modal memiliki arah positif tetapi tidak berpengaruh pada kualitas laba. Likuiditas dan pertumbuhan laba memiliki arah yang negative tetapi tidak berpengaruh pada kualitas laba. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada kualitas laba. |
| 9 | Gerinta Wirawan Yasa (2019) <i>The Influence of Accounting Conservatism, Investment Opportunity Set and GCG on The Earning Quality.</i> | X :- <i>Accounting Conservatism</i> - <i>Investment Opportunity Set</i> - GCG Y : - <i>Earning Quality</i> | Kuantitatif | Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laba. <i>Investment Opportunity Set</i> berpengaruh positif pada Kualitas Laba dan GCG tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba. |
| 10 | Bayu Listyawan (2017) Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Laba, dan Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba. | X :-Struktur Modal -Likuiditas -Ukuran Perusahaan -Pertumbuhan Laba -Profitabilitas Y :-Kualitas Laba | Kuantitatif | Struktur modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laba, sedangkan likuiditas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba. |
| 11 | Suriani Ginting (2017) | X :-Profitabilitas -Likuiditas -Ukuran Perusahaan | Kuantitatif | Secara parsial profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran |

Dilanjutkan

Lanjutan

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba | Y :- Kualitas Laba | | Perusahaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. |
|--|--------------------|--|--|

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel dependen kualitas laba. Persamaan lainnya yaitu dengan menggunakan variabel independen *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek penelitian dan tahun penelitian. Dimana penelitian kali ini menggunakan objek perusahaan sub sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI pada periode 2014 – 2018.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory Agency*

Theory agency muncul setelah ada pemisahan tugas dan wewenang antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak pengelola (*agent*) sehingga mengakibatkan ada kesenjangan diantara mereka yang diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan. Menurut (Yudhanto, 2013) yang dimaksud teori agensi adalah hubungan antara pemilik (*principal*) dengan pengelola (agen), yang dimaksud *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang untuk memberikan tugas pada pengelola perusahaan dimana tugas itu wajib diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi kebutuhan dari *principal*, sebaliknya yang dimaksud agen adalah pihak yang menerima tugas atau pekerjaan untuk diselesaikan dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan yang diperintahkan oleh *principal*, hubungan ini dapat lebih dari satu *principal* untuk memberikan tugas kepada agen yang akan mengerjakan tugas yang diberikan.

Perusahaan yang manajemen dan kepemilikannya terpisah tidak akan bisa terlepas dari masalah keagenan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemilik modal, manajer dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemilik modal yang biasa disebut investor akan mempercayakan seluruh dananya untuk diserahkan ke manajer perusahaan untuk dikelola, namun dilain sisi dengan hanya mengandalkan kepercayaan saja ini dapat menimbulkan adanya niat buruk (*moral hazard*) dari para manajer untuk menyalahgunakan informasi yang mereka miliki, karena para manajerlah yang memegang informasi sepenuhnya tentang perusahaan (Yuniarti, 2018).

Asumsi dasar dari teori *agency* adalah bahwa semua individu bertindak/bekerja atas kepentingan mereka sendiri, pemegang saham dianggap hanya akan memperhatikan pada hasil keuangan atau investasi mereka di perusahaan, sementara pada agen atau manajer perusahaan diasumsikan menerima keputusan berupa kompensasi *financial* dan keuntungan lain yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan timbulnya asimetris informasi (kesenjangan informal) antara *principal* dan *agent* (Simamora dkk, 2014).

2.2.2 Theory Stakeholders

Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa keberadaan suatu perusahaan akan memberikan kontribusi bagi para *stakeholdernya* dalam menjalankan kegiatan usahanya (Kusumawati, 2017). Perusahaan harus adil dalam memberikan hak-hak pada *stakeholder* yang berkaitan dengan pembagian informasi mengenai aktivitas perusahaan, karena posisi para *stakeholder* dianggap memiliki kekuatan lebih dalam menjalankan suatu usaha sebuah perusahaan. Jadi dapat diambil kesimpulan perusahaan bukanlah sebuah entitas yang berjalan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lainnya.

2.2.3 Pengertian Good Corporate Governance

Secara sederhana *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai tatanan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* adalah sistem yang dapat mengatur dan mengontrol suatu perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* khususnya dan pada umumnya dapat mencapai tujuan suatu perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kesenjangan antara pengelola dan pemilik perusahaan sehingga dalam proses pencapaian tujuan perusahaan akan lebih efektif dan efisien (Yuniarti, 2018).

Menurut Sukrisno Agoes (2013:101) *good corporate governance* dapat diartikan sebagai berikut:

“Peran dewan komisaris, peran dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya diatur dengan suatu sistem yang

mengatur hubungan diantaranya, yaitu sistem *Good Corporate Governance*. Sistem tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas pencapaian tujuan perusahaan, dan penilaian kinerjanya”.

Menurut Bank Dunia tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai kumpulan hukum, peraturan dan patokan yang wajib dipenuhi sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan agar bekerja secara lebih efektif dan efisien, dan diharapkan nantinya akan menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang baik dimana dengan adanya pengelolaan tersebut diharapkan akan mencegah terjadinya suatu kesenjangan antara pihak manajer dan para pemegang saham dan akan menjadikan mereka mempunyai tujuan dan pemikiran yang sejalan agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

2.2.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*.

Menurut (Hidayah, 2013) mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi yang mengatakan bahwa interaksi bagian satu dengan bagian yang lainnya dalam suatu sistem yang secara tidak sengaja memunculkan fungsi yang sesuai dengan tujuan. Menurut (Pujiati, 2013) Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan ada empat yaitu : *Board Of Commissioner, Audit Commite, Management, dan Shareholder*.

1. *Board Of Commissioner/ Dewan Komisaris*

Peran dewan komisaris sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* (2001) dalam (Agustia, 2013) adalah menciptakan keefektifan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder* perusahaan sebaik mungkin.

Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan bertanggung jawab penuh terhadapnya. Hal ini penting karena manajemen mempunyai kepentingan untuk melakukan tindakan manajemen laba yang berakibat akan mengurangi kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diijinkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki kekuasaan dalam perusahaan, untuk hal itu yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang terkait dengan perusahaan terhadap dewan komisaris adalah dewan direksi (NCCG, 2001) dalam (Agustia, 2013).

Untuk mengurangi permasalahan *agency* yang timbul maka peran komisaris mulai dibutuhkan sekaligus bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh direksi. Menurut (Pujiati, 2013), dewan komisaris dapat diukur melalui :

a. *COM_SIZE (Size of Commissioner)*

Pengukuran dewan komisaris dihasilkan dari jumlah semua anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel. Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak yang bekerjasama dan dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris terafiliasi.

b. *COM_IND (Independent Commissioner)*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen atau semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Dewan komisaris diukur dengan :

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

c. *% COM_OWN (Ownership Commissioner)*

Kepemilikan komisaris diukur dengan :

$$KK = \frac{\text{Kepemilikan saham dewan komisaris}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

d. *AUD (informasi KAP bigfour atau non bigfour)*

De Angelo (1981) dalam (Pujiati, 2013) menyatakan bahwa ukuran KAP yang melakukan audit sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Karena jika KAP Besar (*Big Four*) yang melakukan audit maka dirasa akan berkualitas lebih tinggi karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien , sedangkan

untuk KAP Kecil (*Non Big Four*) dirasa hasil auditnya kurang maksimal karena KAP Kecil belum banyak memiliki sumber daya.

2. *Audit Commitee/ Komite Audit*

Komite audit adalah komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, dan komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris (Reviani, 2012). Komite audit minimum terdiri dari tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal independen yang menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Menurut (Pujiati, 2013) Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, memantau audit eksternal dan memelihara sistem pengendalian internal serta audit internal dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen. Komite audit diukur melalui :

a. *AUD_SIZE (Size of Audit Committe)*

Ukuran komite audit yaitu jumlah total anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

b. *AUD_IND (Independent Audit Committe)*

Jumlah komite audit independen yaitu persentase jumlah anggota komite audit independen terhadap jumlah total komite audit yang ada dalam susunan komite audit perusahaan.

c. *FINEXPERT (Keahlian Komite Audit)*

Adanya seorang ahli dalam bidang keuangan (*financial expert*) yang bertindak sebagai konsultan.

3. *Management*

Tugas dan tanggung jawab dari seorang manajemen atau direktur sebagai organ perusahaan adalah mengelola perusahaan secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan mempertimbangkan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Pujiati, 2013). Manajemen diukur melalui :

a. *DIR_SIZE (Jumlah Dewan Direksi)*

Pengukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi.

b. *M_OWN (Managerial Ownership)*

Untuk mengukur kepemilikan manajerial dinilai berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dibagi jumlah saham yang beredar.

c. *FAMILY (Ada Tidaknya Hubungan Keluarga).*

4. *Shareholder*

Menurut Lumi (2013:8) dalam (Priyadi, 2016) *Shareholder* merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga lain. Lembaga sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman daripada investor individual. Tingginya kepemilikan institusional akan menimbulkan upaya pengawasan yang meningkat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Menurut (Pujiati, 2013) pengukuran *shareholder* menggunakan kepemilikan institusional yang dilihat berdasarkan presentase kepemilikan saham oleh perusahaan asuransi, dana pensiunan, reksadana, perbankan dan institusi lain dibagi jumlah saham yang beredar.

2.2.5 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2017) dalam (Sholahudin, 2018) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan diharapkan menyediakan informasi yang material dan relevan sehingga dengan mudah dapat diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Disamping itu perusahaan juga harus mengungkapkan semua hal yang terkait dengan para pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengambilan keputusan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Dalam mengelola perusahaan, harus dikelola dengan benar, terukur dan sejalan dengan kepentingan perusahaan dan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan harus dapat disampaikan secara terbuka dan wajar. Salah satu prasyarat yang

diperlukan dalam mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan adalah akuntabilitas.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4) *Independency* (Kemandirian)

Agar perusahaan tidak dapat dicampurtangani oleh pihak lain, maka perusahaan harus dijalankan secara mandiri sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

5) *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.2.6 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Algeridge (2005:5) dalam (Iswara, 2014), *good corporate governance* mempunyai lima tujuan utama, yakni :

1. Melindungi hak dan kewajiban pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak memiliki saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan nilai para pemegang saham

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan direksi dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan kualitas hubungan dewan direksi dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu hal yang bisa dilihat dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang didalamnya mencerminkan besar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Menurut (Brigham, 2011) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dan diklasifikasikan berdasarkan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu : perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rata-rata jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (total aset). Ukuran (*size*) perusahaan dapat diukur dengan total aset, penjualan, total hutang perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aset perusahaan.

Menurut (Wati, 2017) Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan :

$$\text{Size} = \text{Log natural (Total aset)}$$

Menurut (Listyawan, 2017) ukuran perusahaan mengacu pada kualitas laba, karena semakin besar perusahaan semakin tinggi kelangsungan bisnis perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan sehingga tidak perlu

melakukan praktik manajemen laba. Menurut (Wati, 2017) Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan eksternal, akibatnya menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman karena perusahaan besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam dunia industri. Ukuran perusahaan yang biasa digunakan untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu, jumlah penjualan dan jumlah utang selama periode tertentu dan total asset yang merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total asset, total penjualan, jumlah laba sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat mencapai tujuan perusahaan.

2.2.8 Kualitas Laba

Menurut (Prayasa, 2012) kualitas laba adalah ketepatan dari informasi laba yang berasal dari sistem pelaporan keuangan perusahaan, dengan adanya informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan maka digunakan sebagai alat untuk menunjukkan adanya hubungan antara informasi laporan keuangan saat ini dengan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. Selain itu kualitas laba didefinisikan sebagai tingkat hubungan antara perusahaan secara akuntansi dan secara ekonomis, sehingga laporan keuangan perusahaan juga

harus dapat mencerminkan kondisi perekonomian perusahaan yang sebenarnya.

Kualitas laba sendiri merupakan tingkat perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan dengan laba yang sesungguhnya terjadi, laba yang berkualitas tentunya akan mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi seperti praktik manajemen, sehingga laba yang tidak mencerminkan kinerja perusahaan akan menjadi tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut (Iglesias & Andriana, 2017) Selama ini tidak ada ukuran yang pasti atau tepat untuk mengukur seberapa besar kualitas laba dari suatu laporan keuangan, yang ada hanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk memproksi kualitas laba tersebut. Tinggi rendahnya kualitas laba tersebut dapat ditentukan berdasarkan apabila tingkat gangguan persepsi pada laba akuntansi sangat kecil atau bahkan tidak ada, maka dapat dikatakan laba akuntansi tersebut berkualitas. Jika semakin besar gangguan persepsi tersebut maka kualitas laba semakin rendah. Gangguan persepsi dalam laba akuntansi tersebut timbul karena *transitory events* atau penerapan konsep akrual.

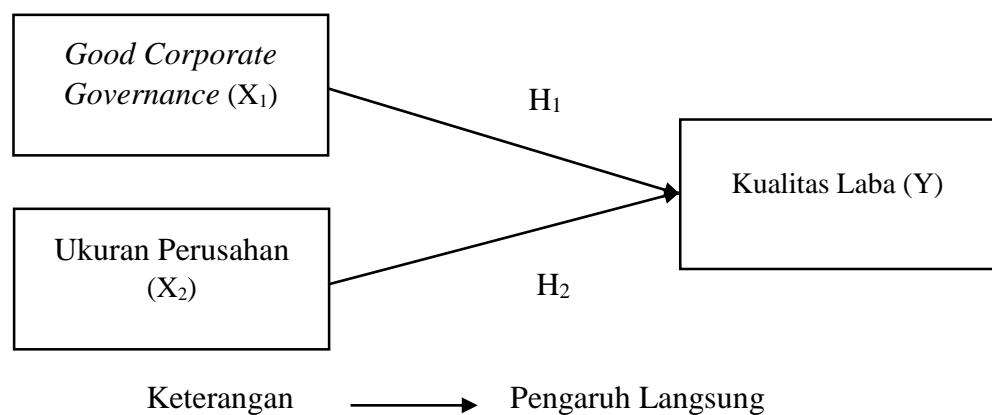
Menurut (Wati, 2017) kualitas laba adalah laba yang secara tepat dan akurat menggambarkan keuntungan operasional perusahaan dan tentunya mencerminkan kelanjutan laba di masa yang akan datang yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang aktual, yang dapat diukur berdasarkan pada hubungan laba-kas-akrual dengan berbagai ukuran : rasio arus kas operasi dengan laba, perubahan total akrual, estimasi abnormal, *diskretionary*

accruals (akrual abnormal/DA), dan estimasi hubungan akrual-kas. Kualitas laba digunakan sebagai pusat informasi dari segala hal informasi yang dihasilkan oleh perusahaan, informasi ini sangat penting karena sebagai pengambilan keputusan bagi investor karena laba yang berkualitas adalah laba yang tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan, maka dari itu laba yang disajikan harus benar-benar laba yang sebenarnya terjadi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laba dapat mencerminkan kelanjutan laba perusahaan dimasa yang akan datang. Kualitas laba dapat dilihat dari bagaimana arus kas operasional perusahaan dan merupakan pusat informasi yang dibutuhkan oleh investor karena berdasarkan kualitas laba yang dilaporkan perusahaan dapat terlihat bagaimana kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

2.3 Rerangka Konseptual

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengidentifikasi indikator *Good Corporate Governance* (X₁), Ukuran Perusahaan (X₂), dan Kualitas Laba (Y).



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dalam suatu penelitian. Tentu saja, asumsi ini terkadang merupakan sesuatu yang sesuai atau benar, dan ada yang tidak tepat atau dugaan salah. Maksud dari kata sementara sendiri adalah karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, dan belum diujikan secara empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang sesuai (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas laba.

Menurut (Yudhanto, 2013) yang dimaksud teori agensi adalah hubungan antara pemilik (*principal*) dengan pengelola (agen), yang dimaksud *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang untuk memberikan tugas pada pengelola perusahaan dimana tugas itu wajib diselesaikan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi kebutuhan dari *principal*, sebaliknya yang dimaksud agen adalah pihak yang menerima tugas atau pekerjaan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperintahkan oleh *principal*, hubungan ini dapat lebih dari satu *principal* untuk memberikan tugas kepada agen yang akan mengerjakan tugas yang diberikan.

Pada teori keagenan mengasumsikan bahwa pemilik dan manajemen perusahaan memiliki kepentingan masing-masing sehingga mereka akan berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing yang

mengakibatkan timbulnya kesenjangan informasi antara pemilik dan manajemen perusahaan.

Kualitas laba adalah ketepatan dari informasi laba yang berasal dari sistem pelaporan keuangan perusahaan, dengan adanya informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan maka digunakan sebagai alat untuk menunjukkan adanya hubungan antara informasi laporan keuangan saat ini dengan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. Kualitas Laba dapat ditentukan sejauh mana keseriusan perusahaan dalam menerapkan GCG, karena perusahaan yang telah menerapkan GCG dengan baik secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas laba perusahaan. Penelitian (Wati, 2017), (Marsela & Maryono, 2017), mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif pada Kualitas Laba.

H1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas laba.

Ukuran perusahaan merupakan suatu hal yang bisa dilihat dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang didalamnya mencerminkan besar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa bagian, yakni perusahaan besar, sedang dan kecil.

Menurut (Wati, 2017) Ukuran perusahaan yang biasa digunakan untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu, jumlah penjualan dan jumlah utang

selama periode tertentu dan total asset yang merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan eksternal, akibatnya menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman karena perusahaan besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam dunia industri. Hasil penelitian (Marsela & Maryono, 2017) , (Dira & Astika, 2014), (Anjelica & Prasetyawan, 2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba